

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang saling bekerja sama, yang dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Adanya pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, serta kerjasama di antara sekelompok manusia, pada akhirnya mereka memiliki pikiran atau perasaan menjadi bagian dari satu kesatuan sekelompok manusia tersebut serta membentuk sebuah kebudayaan. Pengalaman hidup bersama bisa menimbulkan kerjasama, adaptasi terhadap organisasi, dan pola tingkah laku anggota-anggota. Salah satu faktor yang memegang peranan adalah waktu, sebab adanya proses adaptasi dan aktualisasi diri terhadap kehidupan bermasyarakat.

Hidup bermasyarakat merupakan sekelompok orang atau manusia yang hidup bersama yang mempunyai daerah atau tempat tertentu untuk jangka waktu yang cukup lama. Manusia saling berhubungan satu sama lain, hubungan tersebut meliputi sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Sehingga terdapat kebiasaan masyarakat yang membentuk budaya, adat istiadat dan norma yang berlaku sebagai hukum adat.

Kehidupan bermasyarakat secara umum berbeda, perbedaan itu disebabkan terbentuknya struktur sosial di masyarakat dan faktor geografis yang menjadi sarana bermasyarakat. Perbedaan ini terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat desa dan masyarakat kota.

Masyarakat perkotaan biasa disebut *urban community*. Masyarakat kota tidak hanya terbatas pada aspek-aspek sandang, pangan, dan papan. Tetapi meliputi cara pandang dalam pendidikan dan sosial. Masyarakat kota pada umumnya sudah memandang kebutuhan sekunder sebagai faktor utama kehidupan dengan menimbang yang menjadi kehidupannya.

Hidup di daerah padat penduduk dengan mobilitas yang tinggi merupakan pola masyarakat perkotaan. Secara tidak langsung masyarakat perkotaan menciptakan budaya yang kompetitif ditengah kehidupannya yang heterogen. Sehingga secara sosial kehidupan masyarakat perkotaan sering dinilai sebagai masyarakat individualis dengan persaingan yang tinggi dan ketat, serta tidak jarang menimbulkan konflik. Sering dianggap sebagai tempat yang cocok untuk mencari pekerjaan, tempat menimba ilmu pengetahuan, dan tempat untuk transaksi bisnis.

Banyak masyarakat pedesaan merantau ke kota untuk melakukan wirausaha, perdagangan, dan mencari pekerjaan di kota. Sehingga berakibat pada kepadatan penduduk yang sulit untuk dikontrol. Untuk menangani persoalan tersebut, munculah instansi agar masyarakat dapat dibangun dan didukung menjadi masyarakat yang mandiri untuk melakukan wirausaha, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Kehadiran Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) menjadi penting bagi masyarakat perkotaan. Karena dapat menjadi perisai dan *support* dalam menghadapi masalah sosial akibat semakin bertambahnya penduduk. Meledaknya penduduknya yang terus bertambah, harus disiasati dengan menyediakan lahan untuk berusaha, agar dapat

mengantisipasi timbulnya masalah sosial di tengah-tengah masyarakat. Maka Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) hadir bagi masyarakat perkotaan untuk mengantisipasi masalah sosial.

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal perindustribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja.

Masyarakat kota menjadi penting untuk menjadi kajian penelitian. Karena yang mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan tidak hanya masyarakat pedesaan yang harus tetap bertahan secara mandiri untuk kebutuhan hidup. Tetapi juga masyarakat perkotaan yang harus tetap bedikari secara ekonomi agar tidak menjadi kasus baru masalah perekonomian memburuk.

UMKM dan Pengembangan Masyarakat islam memiliki keterkaitan, Pengembangan masyarakat islam merupakan upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan masyarakat. Masyarakat harus mengambil tanggung jawab dalam merumuskan kebutuhan, dan mewujudkan tujuan hidup mereka sendiri. Dalam prinsip pengembangan masyarakat islam salah satunya yaitu kemandirian,

masyarakat hendaknya mencoba memanfaatkan secara mandiri terhadap sumber daya yang dimiliki seperti keuangan dan manusia, daripada menggantungkan diri terhadap bantuan dari luar. Pada intinya agar bisa mandiri dalam berwirausaha. Instansi yang mendukung agar bisa mandiri dalam berwirausaha yaitu UMKM. Pengembangan UMKM memiliki potensi strategis dalam pengembangan masyarakat, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh UMKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan.

Mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia berbagai program dan kegiatan pun dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bersama-sama memberdayakan dan mengembangkan UMKM yang ada.

Dalam Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Pengembangan usaha dapat meliputi fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan usaha. Pemerintah Pusat dan Daerah Memprioritaskan pengembangan usaha Mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan berbagai cara.

Saat ini UMKM tersebar di berbagai Provinsi Indonesia tidak terkecuali pada Provinsi Jawa Barat. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah yang memiliki tugas pokok

dan fungsi sebagai penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, kemitraan dan pengembangan produk UMKM, pembiayaan dan teknologi pengawasan serta pelatihan.

Salah satu Instansi Pemerintah yang ada di Jawa Barat yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung merupakan salah satu instansi pemerintah yang terletak di Jalan Kawalayaan Nomor 2 Kota Bandung. Dinas tersebut merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang mengelola urusan pemerintahan pada bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan bertanggungjawab pada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah

UMKM di Kota Bandung mulai berkembang kurang lebih sekitar tahun 2000, dan jumlahnya terus menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya. Berikut ini tabel perkembangan Jumlah usaha UMKM dari tahun 2012-2016.

Table 1
Jumlah UMKM Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Mikro	3,921	4,115	4,301	4,578	4,689
2	Kecil	337	357	372	392	395
3	Menengah	273	274	276	281	281
	Jumlah	4,531	4,746	4,948	5,251	5,365

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2016

Dapat terlihat dari tabel diatas, jumlah UMKM Kota Bandung terus meningkat. Rata-rata peningkatan UMKM Kota Bandung dari 2012-2016 adalah sebanyak 4% setiap tahunnya.

Hal tersebut menunjukkan begitu besar peranan UMKM sebagai salah satu solusi dari begitu banyakna tenaga kerja yang menganggur. Sehingga dapat dijadikan alternatif untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan UMKM di Kota Bandung. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia memberikan sebuah penghargaan kepada pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut berdasarkan data yang dipublikasikan pada *website* www.inilahkoran.com (diakses tanggal 11 Maret pada Pukul 20.42) yang mengatakan bahwa:

“Kota Bandung menjadi salah satu kota penggerak koperasi dan UMKM tahun 2014 dengan peringkat Paramadhana Madya Nugraha Koperasi dengan nilai 82.10. Penetapan tersebut ditandai dengan diserahkannya penghargaan dari Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Pusapayoga yang diterima Wakil Walikota Bandung Oded M Danial di Gedung SMESCO Tower Jakarta Selatan. Nilai tersebut hasil dari verifikasi lapangan, keberlangsungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.”

Berdasarkan berita di atas, dengan ditetapkannya Kota Bandung sebagai kota penggerak koperasi dan UMKM di Indonesia, menjadikan Kota Bandung sebagai panutan bagi Kota lainnya dalam meberdayakan, mengembangkan, dan menunjukkan potensi UMKM yang dimilikinya. Pemberdayaan UMKM yang berada di Kota Bandung di atur melalui Peraturan Daerah Kota Bandung No 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Daerah ini memuat tentang ketentuan umum, asas, tujuan, arah kebijakan, tugas wewenang

pemerintah daerah, kriteria, perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, kemitraan, hak dan kewajiban masyarakat, dan peran dunia usaha, insentif.

Dinas Koperasi dan UMKM bertugas membina masyarakat dalam bidang usaha. Pembinaan masyarakat dalam bidang usaha merupakan salah satu bentuk penguraian masalah ekonomi yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena dalam penguraian masalah ekonomi tidak bias serta merta memberikan bantuan secara langsung yang akan menyebabkan masalah seperti defisit anggaran dan tidak membant masyarakat secara mental. Maka dengan adanya Dinas Koperasi dan UMKM ini menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kota tingkat menengah kebawah dan akan menjadi nafas ekonomi dikemudian hari.

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung juga sebagai wujud pemberdayaan dan dorongan untuk masyarakat dalam meningkatkan kemampuan berekonomi yang mereka miliki secara mandiri, serta dapat menjadi bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri. Sehingga dalam penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan ekonomi masyarakat kota di kelas menengah ke bawah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka fokus penelitian ini adalah: bagaimana pemberdayaan masyarakat perkotaan melalui pembinaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung.

Dari Fokus Penelitian diatas, diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan masyarakat?
2. Bagaimana Proses Pelaksanaan Program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM?
3. Bagaimana Indikator Keberhasilan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami Proses Perencanaan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM
2. Memahami Proses Pelaksanaan Program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM
3. Memahami Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang Proses Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Melalui Pembinaan UMKM ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi peneliti, dan menjadi rujukan Pengembangan Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam mengenai kajian proses pemberdayaan masyarakat pada Dinas Usaha Mikro kecil dan Menengah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu yang digeluti khususnya ilmu Pengembangan Masyarakat Islam. Selain itu, sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian kesarjanaan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program studi Pengembangan Masyarakat Islam.

b. Bagi UMKM

Diharapkan mampu menjadi bahan dasar evaluasi bagi Instansi terkait. Dan dapat menambah literatur mengenai korelasi Proses Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

E. Landasan Pemikiran

1. Penelitian Sebelumnya

Guna melengkapi penelitian ini, kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan masalah yang sesuai, yang sudah ada sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut diantaranya:

Nandy Hamzah dengan judul *“Peranan Baitul Maal War Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”* (Studi Deskriptif Baitul Maal Wat Tamwil Nur di Desa Balakong Kecamatan Banjar Kota Banjar). Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif Kualitatif. Peranan BMT Nur Desa Balakong dalam pemberdayaan UMKM dianggap baik. Peranan BMT Nur dalam pemberdayaannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi UMKM. Terlihat dari peningkatan ekonomi bagi pengusaha UMKM

dalam pendapatannya selalu meningkat dan dari partisipasi nasabah yang andil dalam memberikan kontribusi ke BMT Nur untuk selalu menabung, meminjam kembali, dan melakukan kerjasama bagi keberlangsungan hidup masyarakat dengan layak dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tika Konaah dengan judul *“Peranan Koperasi Cahaya Nuraray dalam Meberdayakan Usaha Mikro”* (Studi deskriptif terhadap Koperasi Cahaya Nararay di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung). Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif Kualitatif. Mekanisme program yang dimiliki Koperasi Cahaya Nararay secara ekonomi bisa memberikan bantuan pinjaman modal namun lebih sekedar itu secara sosial koperasi ini telah membantu mengorganisasikan kehidupan manusia dalam menegakkan normal sosial budaya. Adapun usaha pengembangan yang dilakukan Koperasi Cahaya Nararay dalam memberdayakan usaha mikro di desa Cimekar diantaranya melalui Pendidikan dan pelatihan pengurus juga anggota koperasi, pengembangan produk simpan pinjam, serta menjadi fasilitator untuk pelegalan produk dan mengadakan konsultasi gratis untuk usaha anggotanya.

Wildan Alawi dengan judul *“Program Pemberdayaan Koperasi Cahaya Anugerah Dalam Meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat”* (Studi Deskriptif di Koperasi Cahaya Anugerah Kelurahan Batu Jajar barat Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung). Penelitian ini difokuskan kepada perekonomian masyarakat yang berskala kecil, yakni kepada masyarakat yang kurang mampu dalam mengelola usahanya. Maka dari itu, pihak koperasi Cahaya Anugerah merupakan koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat dan anggota pada khususnya sehingga bisa dikelola dengan baik dan mengarah kepada arah yang lebih sempurna.

2. Landasan Teoritis

Istilah pemberdayaan adakah terjemahan dari istilah asing *empowerment*. Walaupun pemberdayaan merupakan kata yang telah digunakan secara berlebihan dan sedang berada dalam bahaya kehilangan arti substansinya. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat interchangeable atau dapat dipertukarkan. (Machendrawati dan Ahmad Safe'i, 2001:42-43)

Pengertian lain menyebutkan, pemberdayaan atau pengembangan tepatnya pengembangan sumber daya manusia adalah upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. (Nanih Machendrawaty, 1994:42)

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan

dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah masyarakat mandiri.

Edi Suharto (2014:59) mengemukakan pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Maka sebagai tujuan dari pemberdayaan adalah berorientasi pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dari sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kuasa atas dirinya dan mempunyai pengetahuan serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, dan sosial. Seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan informasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan diatas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan pemeliharaan.

Dalam konteks Pekerjaan sosial, (Suharto,2016:66) pemberdayaan dengan melalui proses pendampingan, harus memiliki strategi dalam pelaksanaannya. Strategi dapat diartikan suatu kesatuan rencana yang terpadu, yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Penyusunan strategi perlu dihubungkan dengan lingkungan organisasi sehingga dapat disusun kekuatan strategi organisasi, dan pencapaian tujuan organisasi, memerlukan alternatif strategi yang

dipertimbangkan dan harus dipilih. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui tiga proses, diantaranya:

a. Proses Pembinaan

Pembinaan yang dimaksud disini adalah suatu usaha untuk melakukan pembinaan kepribadian yang mandiri dan sempurna serta dapat bertanggung jawab, atau suatu usaha, pengaruh, perlindungan dalam bantuan yang diberikan kepada masyarakat agar cakap dalam melaksanakan tugas hidup mandiri. Menurut Mitha, pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atau berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu.

Pembinaan dapat diartikan pula suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup dan memiliki keinginan untuk diwujudkan. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang polanya.

b. Proses Pembiayaan

Pembiayaan atau bisa disebut juga pemberian modal usaha, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Lystiawan Ardi Nugraha (2011:9) merupakan uang yang dipakai sebagai (pokok) atau induk untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan

kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa uang modal bukanlah segalanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan disini bukanlah penting atau tidaknya modal, karena keberadaannya sangatlah diperlukan. Akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar.

c. Proses Pengembangan

Pengembangan dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai.

Secara khusus pengembangan masyarakat berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas. Baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan. (Edi Suharto, 2003: 12)

Ketika sudah melakukan ketiga aspek tersebut, proses menjadikan masyarakat yang berdaya dan bisa hidup mandiri akan terealisasikan. Sedangkan indikator keberhasilan dari sebuah proses pemberdayaan masyarakat pada dasarnya tidak memiliki suatu diameter ukuran yang pasti.

Dari berbagai pandangan tentang pemberdayaan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan adalah aktivitas untuk mendorong dan meningkatkan kekuatan atau keberdayaan dari orang-orang yang awalnya lemah atau tidak

beruntung menjadi berdaya, kuat, berketampilan, mempunyai kemampuan dan mandiri, maka tujuan yang dicapai dari semua itu adalah adanya perubahan sosial, dari yang awalnya tidak mempunyai pengetahuan karena ada proses edukasi dan pendampingan sehingga tercipta masyarakat yang berpendidikan, dengan adanya motivasi dan dorongan sehingga membentuk percaya diri dari masyarakat sehingga masyarakat berani untuk berkreasi dan mandiri.

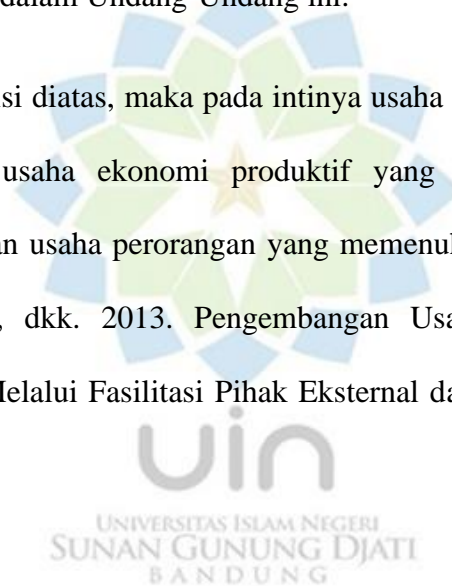
Munculah lembaga agar masyarakat lebih mandiri yaitu Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Sektor koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), secara umum adalah manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal. Asas UMKM adalah kebersamaan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, keberlanjutan, dan lain-lain. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki pengertian yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi dan lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang yang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha

Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

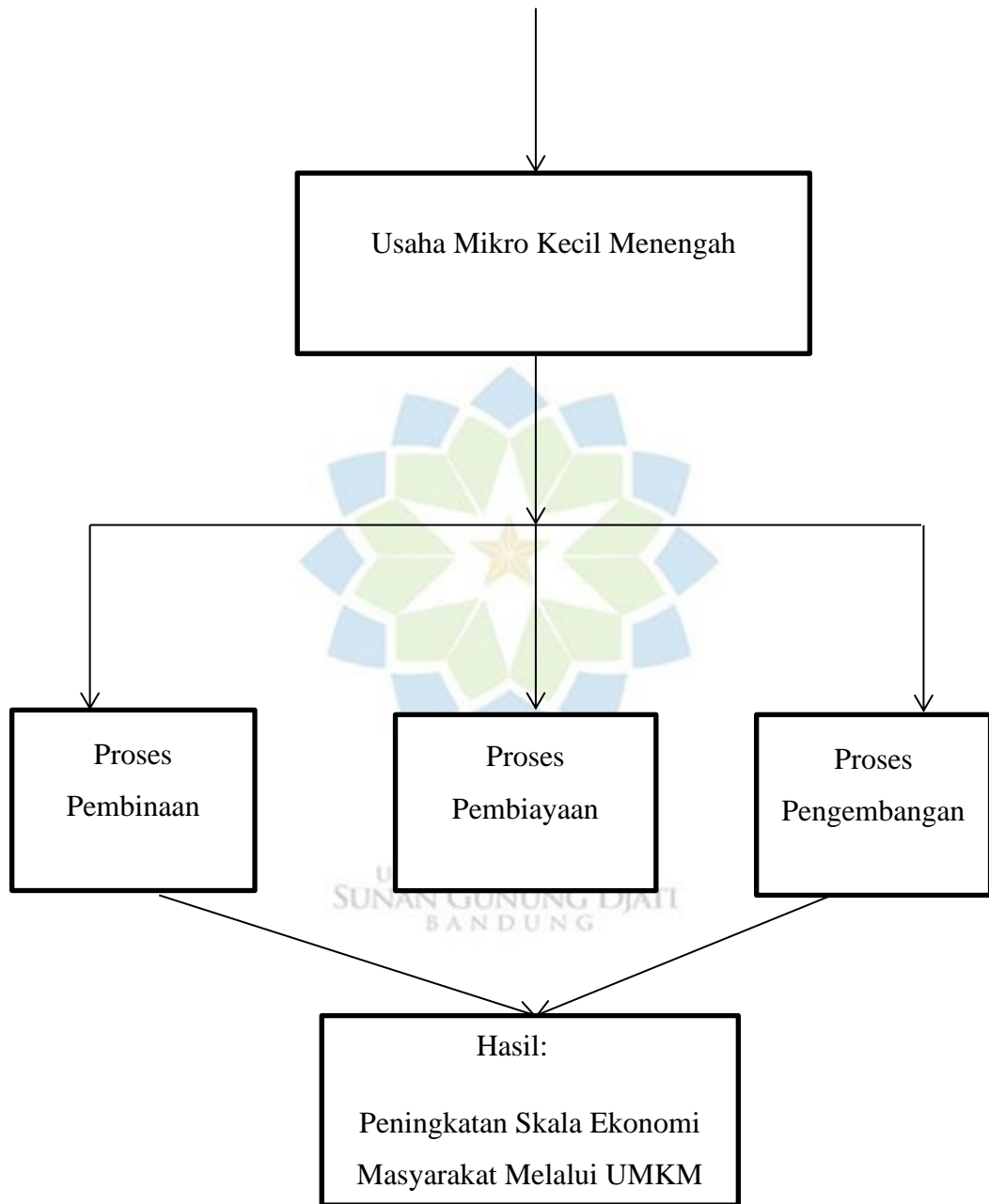
- c. Usaha menengah adalah usaha yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya usaha Mikro Kecil Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha, Kecil dan Menengah. (Feni, dkk. 2013. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan potensi Internal. Vol 1 No 6



3. Kerangka Konseptual

Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan



F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini disebut juga dengan istilah metodologi penelitian atau prosedur penelitian (Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2019:15)

Uraian pada bagian ini terdiri atas:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung. Alasan memilih lokasi ini karena, adanya sumber data yang menjadi penting bagi literatur Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam serta menjadi acuan bagi fokus pengembangan ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai usaha kecil.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan paradigma kualitatif. Paradigma dipahami sebagai cara mendasar untuk memersepsi, berpikir, menilai, dan menilai yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas (Penelitian kualitatif). Artinya bahwa, dengan memahami paradigma penelitian kualitatif dipercayai seorang peneliti akan mampu bekerja dan melakukan penelitiannya dengan benar, sesuai dengan cara kerja penelitian kualitatif yang bersifat naturalistik, subjektif dan holistik. (Ibrahim, 2015:10)

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif melalui pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dilakukan oleh subjek penelitian.

Alasan menggunakan Metode Deskriptif karena metode penelitian tersebut akan mengungkapkan masalah-masalah aktual terkait dengan objek yang diteliti. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan dan menggambarkan, serta menganalisa masalah yang terjadi.

4. Jenis Data

Jenis Data yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang Proses Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan Masyarakat
- b. Data tentang Proses Pelaksanaan Program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM
- c. Data tentang Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM

5. Sumber Data

- a. Untuk mendapatkan data tentang proses perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan Masyarakat Kota di dapat dari Kepala Pemberdayaan UMKM yaitu Ibu Nuri Nuraeni sebagai sumber data primernya, sedangkan sebagai sumber data sekundernya di dapat dari data, dokumen-dokumen, yang bersangkutan dengan proses perencanaan yang dilakukan UMKM.
- b. Untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan Masyarakat Kota di dapat dari Kepala Pemberdayaan UMKM yaitu Ibu Nuri Nuraeni sebagai sumber data primernya, sedangkan sebagai sumber data sekundernya di dapat

dari data dan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan proses pelaksanaan yang dilakukan UMKM.

- c. Untuk mendapatkan data tentang keberhasilan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan Masyarakat Kota di dapat dari Staf atau karyawan UMKM sebagai sumber data primernya, sedangkan sebagai sumber data sekundernya di dapat dari data dan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan hasil yang dilakukan UMKM.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian seperti:

- a) Mengamati proses perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM
- b) Mengamati proses pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM
- c) Mengamati hasil yang diperoleh dari Dinas Koperasi UMKM

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian ini sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dan informan. (Djam'an. Aan, 2017:130)

Maka teknik wawancara dalam penelitian ini yang akan dilakukan adalah peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan atau tanya jawab dengan Kepala Pemberdayaan UMKM yaitu Ibu Nuri Nuraeni sesuai dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berkenaan dengan peristiwa atau kegiatan yang menghasilkan sebuah informasi, fakta dan data baik berupa catatan, foto dan lain-lain. Dalam hal ini penulis akan melaksanakan studi dokumentasi, yaitu dokumen yang berkaitan dengan data di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik penentuan Keabsahan Data dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi data. Yaitu dilakukan dengan cara membandingkan data yang dihasilkan dari beberapa teknik yang berbeda, yang digunakan dalam penelitian. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, data hasil wawancara dengan data dokumentasi, atau data dokumentasi dengan data hasil observasi. Dengan cara ini peneliti dapat menemukan data yang absah dan dapat dipercaya.

8. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi maka selanjutnya yaitu pengolahan data yang sudah diperoleh dari ketiga metode, kemudian dikumpulkan secara dan disusun secara jelas. (Sadiah, 2015:91)

Menurut Milles dan Hubberman (1994), yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (drawing and verifying conclusion).

a. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan proses seorang peneliti perlu melakukan telaahan awal terhadap data-data yang dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian.

b. Penyajian Data (Display)

Penyajian data dapat diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data. Upaya memaparkan dan menyajikan secara jelas data-data yang dihasilkan gambar, dan lain-lain.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan, data yang telah dihasilkan dan disusun telah dapat memberikan jawaban yang baik dan jelas mengenai permasalahan penelitian. Jika belum mampu menjawab, atau masih ada yang kurang jelas, maka peneliti harus melakukan verifikasi.